

**STATUS HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG CACAT MENTAL
DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)



Oleh:

MUHAMMAD ZUHUDI

122111098

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2019

Anthin Lathifah, M.Ag

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr/i. Muhammad Zuhudi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zuhudi

NIM : 122111098

Jurusan : Ahwal al-syakhsiyyah (AS)

Judul : Status Hukum Pernikahan Penyandang cacat mental dalam
pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juli 2019

Pembimbing I,



Anthin Lathifah, M. Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : "STATUS HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG CACAT
MENTAL DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI' DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974"

Nama : Muhammad Zuhudi
NIM : 122111098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program studi : SI

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Semarang, 31 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua,

NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H
NIP. 1979102222007012011

Penguji I,

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 1971110120060441003

Sekretaris,

ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji II,

BRILIYAN ERNA WATI, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I,

ANTHIN LATHIFAH, M.Ag
NIP. 197511072001122002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹

¹ Al-qur'an Surah Al-Hujurat: 13, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 517

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku,

Bapak **Muslim**, Seorang Bapak hebat yang selalu mengajarkan perjuangan dalam menggapai harapan.

Ibu **Suryani**, seorang Ibu yang kasih sayang dan do'anya selalu mengiringi disetiap langkah kakiku.

2. Para Kyai dan Guruku yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan sabar dan ikhlas. Mereka laksana lampu-lampu yang menerangi kelamnya malam.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zuhudi
NIM : 122111098
Jurusan : Hukum keluarga islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : "Status Hukum Pemikahan Penyandang Cacat Mental Dalam
Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya Dengan Undang Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 Agustus 2019



Muhammad Zuhri

Abstrak

Manusia memiliki hak yang sama, dalam Undang-undang RI no 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang difabel memiliki hak yang sama, hak melakukan perkawinan yang sah, serta mendapat perlindungan dan kasih sayang dari sebuah keluarga. Namun ketika melangsungkan perkawinan banyaknya hambatan-hambatan dan rintangan dalam menakhodai rumah tangga. Sehingga sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Maka dari itu, kedua calon mempelai harus masak usia, mental, dan psikologi. Agar bisa memecahkan segala permasalahan yang dihadapi ketika mengalami rintangan yang datang. Namun dalam kenyataannya manusia sangat beragam, tidak semua manusia dilahirkan sempurna dalam segi fisik, psikologi, begitu juga mental. Seperti yang dialami oleh para penyandang difabel mental. mereka untuk beraktivitas memenuhi dirinya sendiri mendapat hambatan-hambatan apalagi dengan berkeluarga berarti dia harus memenuhi kewajiban baik ia sebagai istri maupun suami disamping ia mendapatkan hak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ketika memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan *library research*. Dengan metode yang digunakan, penulis berharap dapat memperoleh data yang jelas dan pasti dari kepustakaan yang berkaitan dengan teori-teori mengenai pendapat-pendapat tentang penyandang difabel mental khususnya dalam perkawinan. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis-medis*.

Hasil penelitian ini sebagai istinbatnya Imam Syafi'i menggunakan Nas Al- Qur'an surat al-Hujarat ayat 13. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di "mata" Allah tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak dipandang secara fisik, namun apa yang telah mereka lakukan dalam menggapai ridha Allah SWT. Imam syafi'i memandang bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Namun ketika diaplikasikan dalam tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 sangat relevan. Sebab dalam sistem perundangundangan perkawinan di Indonesia khususnya penyandang cacat mental hukunya sebagaimana orang biasa dengan syarat diperbolehkan walinya untuk menikah. dan status hukum perkawinan mereka adalah sah.

Kata Kunci: *Perkawinan, Safih, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillahirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan dan dukungan moril ataupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih secara mendalam kepada :

1. Orang tua, adik dan keluarga besar yang sudah menjadi motivator dan senantiasa memberikan nasihat, kasih sayang serta panjatan do'a yang tiada henti untuk penulis.
2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A, dan segenap dosen prodi Hukum Keluarga yang senantiasa member arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran stafnya yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama masa perkuliahan.

5. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an An-nasimiyah semarang, khususnya KH. Hanief Ismail, L.C., yang telah mengasuh, membimbing, memotivasi penulis. Dan kepada Gus Mundzir Beliau sangat berjasa besar bagi penulis hingga sampai pada titik saat ini.
7. Ikatan Siswa Abiturien (IKSAB) di Semarang yang menjadi majelis alarm agar selalu ingat dengan perjuangan dan jasa para guru masyayikh kita terdahulu di saat silau akan gemerlap cahaya Kota Atlas.
8. Keluarga besar AS B 2012 yang senantiasa menemani hari-hari penulis sejak masuk kuliah, belajar, dan diskusi sampe menjelang akhir kuliah.
9. Segenap keluarga besar UKM JQH El-Fasya El-Febi's terimakasih telah menjadi keluarga kedua penulis dan telah memberikan banyak ilmu, pengalaman berharga tentang arti kebersamaan dan kekeluargaan. *Salam Semangat salam JQH.*
10. Kawan-kawan penulis (Gus Hakim, Ragil, Ainun, dan Andri) yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studinya.
11. Semua pihak yang tidak bias sebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan “*jazakumullah khairan katsiran*“. Penulis telah menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik berupa komentar atau kritik yang konstruktif dari para pembaca akan selalu penulis harapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan perkawinan di Indonesia.

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis,

Muhammad Zuhud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan manfaat penelitian	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Menikah	24
B. Dasar Hukum Menikah	29
C. Hukum Menikah	32
D. Tujuan dan Hikmah Menikah	39
E. Rukun dan Syarat Sah Menikah	31

	F. Prinsip-prinsip Menikah	46
	G. Hikmah Menikah	52
	H. Difabel Mental.....	54
BAB	III PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG CACAT MENTAL	
	A. Biografi Imam Syafi'i.....	60
	B. Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'I	73
	C. Pendapat Imam Syafi'i tentang status Hukum Pernikahan Penyandang cacat Mental	88
BAB	IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN PENYANDANG CACAT MENTAL DALAM PANDANGAN IMAM SYAFII DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974	
	A. Analisis Pendapat Imam Syaf i'i tentang Pernikahan Penyandang Cacat Mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	105
	B. Analisis Pernikahan Penyandang Cacat Mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	124
BAB	V PENUTUP	
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran-Saran	134
	C. Penutup	134
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Adapun pedoman transliterasi arab - latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Konsonan

ع= ʿ	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= ʿ	ي= y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

B. Vokal Pendek

َ- = a

ِ- = i

ُ- = u

C. Vokal Panjang

اَ+ = ā

يَ+ = ī

وَ+ = ū

D. Diftong

اي= ay

وا= aw

E. Syaddah (َ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya القمرية *al-Qamariyyah*

F. Kata Sandang (لا ...)

Kata sandang (لا ...) ditulis dengan al-... misalnya الهلال *al-hilāl*. Al-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan “h” misalnya الرعية ditulis dengan *ar-ru`yah*.²

²Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 61-62.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanita pun membutuhkan adanya laki-laki, inilah fitrah.

Menurut ahli Fiqh berarti: akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.¹ Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang CV.Toha Putra:1993), hlm.2.

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²
Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan *mitsaqan ghalidzan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Keduanya (suami istri) memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi. Dalam al-Qur'an digambarkan, bahwa hubungan yang sah itu dengan suasana yang penuh kesejukan, kemesraan, keakraban, kepedulian yang tinggi, saling percaya pengertian dan penuh kasih sayang, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al- Qur'an Surat Ar- Rum (30) : 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³

Adapun tujuan rumah tangga bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang sejahtera, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.⁴

Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 disebutkan: Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

³ Al-qur'an Surah Ar-Rum: 21, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 406

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 32.

anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵

Fenomena cacat mental (*tunagrahita/retardasi mental: mental retardation*) merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia. Cacat mental مغلوب على عقله⁶ merupakan kelainan pada fungsi otak yang mengakibatkan ketergantungan dalam hidupnya. Penderita *tunagrahita* (cacat mental) merupakan keterbelakangan akibat terhambatnya fungsi kecerdasan secara organik berlangsung pada kadar yang bertingkattingkat dari yang paling ringan sampai berat, ditandai lemah dalam pelajaran sekolah, pergaulan sosial dan proses menjadi kedewasaan.

Anak yang cacat mental sering disebut anak tunagrahita yaitu anak yang cacat pikiran, lemah daya tangkap, idiot.⁷ *Tunagrahita* atau sering dikenal dengan

⁵ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2.

⁶ مغلوب على عقله adalah istilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm untuk menyebutkan penderita cacat mental. Lihat: Al-Imam Asy-Syafi'i, (terj. Ismail Yakub), AlUmm (Kitab Induk), juz VII, (Jakarta: CV. Faizan, 1983), hlm. 171.

⁷ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1233.

cacat mental adalah kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolok ukur yang sering dikenakan untuk ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Anak yang secara signifikan mempunyai IQ di bawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Sebagaimana halnya anak tunarungu, tunagrahita juga dapat dikelompokkan menjadi tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalam hal ini adalah kemampuan mental yang di bawah normal, namun kondisi ini berpengaruh pada kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk bersosialisasi dan menolong diri sendiri.⁸

Oleh sebab itu James D. Page memberikan definisi tentang retardasi mental yang dalam istilahnya disebut dengan defisiensi mental sebagai berikut:

“Mental deficiency is a condition of subnormal mental development, present at birth or early childhood and characterized mainly by limited intelligence and social inadequacy”. (Defisiensi mental adalah suatu kondisi perkembangan mental yang tidak normal, yang menggambarkan pada kelahiran atau tabiat awal anak

⁸ Wardani, dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 1.9.

terutama oleh intelegensi yang terbatas dan keadaan sosial yang tidak cukup).⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa retardasi mental merupakan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang muncul selama masa pertumbuhan.

Dalam beberapa perundang-undangan yang ada, kecacatan disebutkan diantaranya dalam: Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York, ayat 1 tentang definisi penyandang cacat adalah:

“Istilah penyandang cacat: berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka,

⁹Ames D. Page, *Abnormal Psychology, Clinical Approach to Psychological Deviants*, (New Delhi: Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD., 1978), hlm. 1.

baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya”.¹⁰

Imam as-Syafi’i menyebutkan bahwa orang yang menderita keterbelakangan mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukan pun dipandang batal kecuali dengan seizin wali.¹¹

Hal ini sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya.¹² Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar’i.

Dalam kaidah hukum taklifi disebutkan bahwa mahkum ‘alaih (orang yang dibebani hukum) mempunyai

¹⁰ Majelis Umum PBB, *Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, [Resolusi 3447 (XXX) tanggal 9 Desember 1975], ayat 1.

¹¹ Asy-Syafi’i, *Al-Umm :Kitab Induk*, (Ismail Yakub, terj.), juz VII, (Jakarta: CV. Faizan, 1983), hlm. 171-173.

¹² Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 334.

dua syarat pembebanan hukum, yaitu: *Pertama*, sanggup memahami khita-khita pembebanan, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, baik dengan dirinya sendiri maupun perantara; dan *Kedua*, mempunyai kemampuan untuk menerima beban (*ahliyah*). Dalam konsep *ahliyah* ini dikenal dua istilah yaitu *pertama*, *ahliyah wujub* yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia dengan dasar kemanusiaan; dan *kedua*, *ahliyatul ada* (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.¹³

Dengan melihat faktor *ahliyah* di atas, khususnya *ahliyah al-ada*, maka penderita keterbelakangan mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklifi. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut sebagai *mahkum 'alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).

Penderita cacat mental digolongkan kepada keadaan *ahliyah al-ada* yang tidak sempurna. Karena pada dasarnya akalunya tidak hilang, tetapi akalunya lemah

¹³ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 164-167.

dan kurang, maka dia dihukumi seperti anak mumayyiz.¹⁴ Maka gangguan mental juga diartikan seperti Seorang safih (idiot; termasuk dalam salah satu jenis kecacatan mental) dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya.¹⁵

Mengenai hak untuk memperoleh pengakuan yang sama terhadap segala proses kehidupan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 5 bahwa: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁶

Kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental. Sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah yang berkaitan dengan

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (terj. Faiz el-Muttaqin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 194.

¹⁵ Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur Ab, dkk, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 688.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.

pernikahan tersebut, dan dapat disamakan dengan pernikahan orang-orang biasa.

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, ditemukan adanya perbedaan pendapat diantara Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pernikahan juga berkaitan dengan akad, maka akad yang dilakukan oleh penderita cacat mental adalah batal jika tidak ada izin dari wali. Disamping itu, jika dikaitkan dengan kewajiban yang melekat pada perkawinan, bagaimana penderita keterbelakangan mental dapat memenuhi tanggung jawab seperti kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri, dan bagaimana mereka mengasuh dan membesarkan keturunan. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental. Maka hal ini terdapat kesenjangan yang membutuhkan solusi konkrit yang berkaitan dengan pernikahan berstatus cacat mental. Oleh sebab itu peneliti beranggapan agar dalam penelitian ini dapat dikaji dengan komprehensif suatu kajian ilmiah dengan judul: ***“Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafii dan***

***Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974”***

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pemikiran yang melatar belakangi masalah ini, maka perlu dijelaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental?
2. Bagaimana pandangan Iman Syafi’i tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Iman Syafii tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam artian untuk membangun dan memperkuat dari teori yang sudah ada dan Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam tentang masalah pernikahan penyandang cacat mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat secara umum dan terkhusus penulis sendiri tentang masalah pernikahan penyandang cacat mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana objek kajian dan penelitian tentang “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” Maka perlu kiranya dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literature. Karena dalam penelitian ilmiah, satu hal yang penting yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan peninjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, yang lazimnya disebut dengan istilah *Prior Research*. *Prior Research* sangat penting dilakukan dengan alasan: Pertama, untuk menghindari duplikasi ilmiah, Kedua, untuk membandingkan kekurangan atau kelebihan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, Ketiga, untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya.¹⁷

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mencari literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan adanya keterkaitan dengan literature sebagai berikut:

¹⁷ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Skripsi dengan judul “Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat” oleh Faidhur Rahmani (2101202), Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pendapat Ibn Hazm tentang tidak ada fasakh dengan alasan cacat. Dalam konsep Ibn Hazm ditemukan adanya solusi alternatif dalam fasakh karena cacat, yaitu bolehnya istri mengajukan khulu’ dan kebolehan talaq bagi suami. Hal ini sejalan dengan tujuan syari’ dalam mensyariatkan hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dan menarik keuntungan dan melenyapkan madharat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan dokumen-dokumen naskah dalam merumuskan hasil temuan.¹⁸

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Difabel” oleh Muftiri Muta’lali, dalam skripsi ini meninjau dari dua segi kajian yaitu hukum islam dan menurut UU perkawinan. Penelitian tersebut hanya membahas

¹⁸ Faidhur Rohmani, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2006.

spesifikasi mengenai qobla nikah (sebelum akad). Dalam skripsi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa orang penyandang difabel mental boleh menikah dengan IQ di atas 50, tetapi IQ di bawah 50 dicegah dengan alasan madharat lebih besar. Serta boleh terjadi pernikahan dalam hukum positifnya asalkan dengan persetujuan dispensasi nikah. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah status hukum mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya.¹⁹

Skripsi dengan judul “Hak Pendidikan Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak” oleh Abdur Rahman. Dalam skripsi itu membandingkan antara undang-undang dan hukum islam mengenai hak pendidikan terhadap anak difabel mental. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah status hukum mengenai sah dan batal dan relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan.²⁰

¹⁹ Mufti, Mutala’li, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

²⁰ bdurahman, *Hak Pendidikan Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang*

Dari beberapa problem seorang perkawinan difabel mental salah satunya tentang bolehnya fasakh nikah. Perlunya ada tujuan hukum bagi mereka. Maka hal ini menjadikan perbedaan dari penelitian lainya itu akibat hukum dari seorang perkawinan difabel mental ditinjau dari maqhosidalsyariah. Demi manfaat dan madharatnya akan perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan dalam sebuah mermasalahan.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode untuk memperoleh data sebagai berikut:

perlindungan Anak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

²¹ Joko Subagiyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis

- #### a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap materi yang akan diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran norma yang berlaku dari berbagai norma.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap materi yang diteliti pada peraturan hukum Islam yang berlaku

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

- a. Sumber Data Primer

Sumber primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab Imam Syafi'i adalah kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder, yaitu kitab-kitab dan buku buku yang membahas tentang masalah buku-buku, undang-undang perkawinan, fikih munakahat, sebagai penunjang atau pelengkap.

- c. Data tersier

Sumber tersier yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti kamus, dan berapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang disajikan penulis menggunakan metode analisis data Komperatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, kemudian menganalisis status pernikahan penyandang cacat mental dalam pandangan Imam

Syafi'i dan relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan. Dalam analisis data terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dan membuang yang tidak perlu.²³ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa

²³ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 32

mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

- c. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka di buat pokok-pokok pembahasan dalam masing-

²⁴Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,..., hlm. 33

masing bab secara keseluruhan. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Adapun penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah perkawinan. Pengertian cacat mental, klarifikasi cacat mental.

BAB III : Mengemukakan biografi Imam Syafi'i, riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya serta karyanya dan mengenai metode istinbath hukum.

BAB IV : Merupakan uraian analisis penyusunan Terhadap Pendapat Imam Syafi'i mengenai status hukum perkawinan penyandang cacat

mental dan relevansinya dengan Undang-undang pernikahan.

BAB V : Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya dan kata penutup.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Menikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Perkawinan disebut juga nikah, nikah berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).² Pernikahan sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*). Juga akad nikah.³

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ
اسْتِمْتَاءِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.⁴

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

² M. bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 109

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 9

Artinya: *perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*

Menurut Abu Yahya zakariya Al-Anshary mendefinisikan tentang nikah:

النكاح شرع هو عقد يتضمن اباحةً وطئ بلفظ النكاح أو نحوه

Artinya: *Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna denganya.*⁵

Kemudian Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas, beliau memberikan definisi sebagai berikut:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.

Artinya: *Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan*

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 10

⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8

mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁶

Sebagai suatu perjanjian yang suci ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua pasangan sehingga tidak ada unsur paksaan. Ia mengikat tali perjanjian atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai bermaksud membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 21:⁷

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri – istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

⁶Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 8

⁷Al-Quran, Surat An-Nisa', *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), hlm. 190.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan “*mitsaqan*” menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau “*gholiidan*” untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yang mengikatkan perjanjian itu memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar dalam ajaran-ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah, namun juga berkaitan dengan hukum suatu negara. Sehingga perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum Allah dan hukum negara.

Para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama’ fiqih sebagai berikut:⁸

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

- 1) Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- 2) Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- 3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- 4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- 5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta

menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

B. Dasar Hukum Menikah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia didunia sebagai khalifah. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenis sendiri, sehingga dari masing-masing daari keduanya mendapatkan ketenangan. Pria dan wanita bersyarikat untuk memakmurkan dunia ini.

Hubungan suami isteri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal-hal yang memperkuat ikatan persyarikatan antara pria dan wanita. Selain itu, adanya sang isteri disamping suami akan menentramkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia menurut fitrahnya tidak akan mampu

menahan nafsu seksual. Hanya manusia yang sakit yang dapat meninggalkan perkawinan. Islam sebagai agama yang fitrah, menyalurkan sesuatu menurut semestinya. Mengenai penyaluran hasrat seksual, Islam mensyariatkan pernikahan.⁹

Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat diantara mereka tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Dasar hukum yang menunjukkan persyariaan menikah adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan*

⁹ Ibrahim Husain, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2003), hlm. 131

*laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹⁰

b. Dalil dari Sunnah

عن عبدالله كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Dari Abdillah bahwa kami bersama Rasulullah SAW, seorang pemuda tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka rasulullah berkata kepada” hai golongan pemuda bang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Kaarena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farji, dan bagi yang tidak

¹⁰ Al-qur'an Surah An-Nisa: 1, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 77.

sanggup kawin hendaklah berpuasa karena sesungguhnya berpuasa dapat melemahkan syahwat.¹¹

C. Hukum Menikah

Pada dasarnya golongan fuqoha yakni jumbuh berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah adalah wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang, dan sunnah untuk sebagian orang lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan wajib, sunnah, atau mungkin mubah, Q.S An-Nisa Ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

¹¹Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, hlm. 132

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*¹².

Dan dalam hadis Nabi dijelaskan, sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمر وأن رسول الله عليه وسلم قال: أنكحوا امهات الأولاد فإنني أباهي بهم يوم القيامة¹³. (رواه ابن جميل)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita-wanita yang subur yang bisa meberikan banyak anak, sesungguhnya (Nabi) bangga dengan mereka pada hari kiamat.*

¹² Al-qur'an Surah An-Nisa: 1, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 77.

¹³ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Mu'assah Qurftlbah, 2007), hlm. 5

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu biasa berubah sesuai dengan landasan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nur Ayat: 33

وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ
مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan*

pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹⁴

Pada pemikiran hukum islam bahwa setiap wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah:¹⁵

مَا لَا يَنْمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

¹⁴ Al-qur'an Surah An-Nur: 33, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 350.

¹⁵ Abdurrahman, *Fiqih Munahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19

Artinya: *sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: *sarana itu sama dengan hukum yang yang dituju.*

b. Sunnah

Bagi orang yang menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam islam. Diriwayatkan dari sa'ad bin abi Abi waqash:

إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَئِذٍ لَتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ.¹⁶ (رواه أحمد بن حنبل)

Artinya: Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: suatu ketika orang-orang yahudi pasti akan

¹⁶Abdurrahman, *Fiqh Munahat*, hlm. 21.

mengetahui bahwa dia Agama kami ada catatan, sesungguhnya aku (Nabi) diutus dengan ajaran yang lurus dan ramah.

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkanya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah haram. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*¹⁷

¹⁷ Al-qur'an Surah Al-Baqarah: 195, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 2.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya walaupun tidak mengikutinya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu dia terhenti dan melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak mendesak alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.¹⁸

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan oleh dimensi akidah dan akhlak Islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang tauhid dan berakhlak, sebab perkawinan seperti inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan *sakral*

¹⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 31-36

untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.¹⁹

D. Tujuan dan Hikmah Menikah Secara Umum

1. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تتكح النساء لأربع لماله ولحسبها ولجمالها ولدينها فافزر بذات الدين تربت يداك.²⁰ (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari abi hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya,*

¹⁹ M. anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10

²⁰ Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Daarul Hadis, 1988), hlm. 226

keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.

Allah mensyariatkan pernikahan dalam islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, diantaranya:

- a) Menjaga keturunan. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.
- b) Menjaga wujud manusia. Tanpa pernikahan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini dan dengan perkawinan, manusia berkembang biak dengan melalui lahirnya keturunan mereka.
- c) Menciptakan rasa kebapaan dan keibuan. Membuahkan rasa kebapaan dan memurnikan rasa keibuan, sehingga terwujudlah tradisi saling tolong menolong antara suami isteri dalam mendidik anak untuk mencapai kebahagiaan.²¹

2. Hikmah menikah

Menikah merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat tegakkan

²¹ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 11

dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho Allah SWT.

Hikmah menikah dilihat dari segi sumber, ada tiga hal:

a) Menurut Al-Qur'an

Ada dua ayat yang menonjol tentang hal pernikahan ini, pertama dalam surah al-A'raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ
رَبَّهُمَا لَنْزِلَ إِلَيْهِمَا نَذِيرًا فَاتَّبَعْنَا صَلَاحًا أَنْ كُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah*

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".²²

Tujuan menikah adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya kita juga tidak dilarang bersenang-senang (tentunya tidak sampai meninggalkan sesuatu yang penting karenanya), karena memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung sehat jasmani dan rohani. Kedua dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

²² Al-qur'an Surah Al-A'raf: 189, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 151.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²³

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluknya secara pasang-pasangan agar ada kedamaian dalam beribadah dan menjalani hidup yang lebih sempurna. Dalam penjelasan ayat ini terkandung tiga makna yang dituju suatu pernikahan itu yakni:

²³ Al-qur'an Surah Ar-Rum: 21, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 406.

- 1.) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang atau diam. Akar kata taskunu dan yang sepertinya adalah sakana, sukun, sakin yang semuanya berarti diam. Itulah sebab pisau dinamakan sakin, karena bila diarahkan leher hewan ketika menyembelih, hewan tersebut akan diam.
- 2.) *Muwaddah*, memmbina rasa cinta, akar kata muwaddah adalah wadda yang berarti tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasang-pasangan muda dimana rasanya cintanya sangat tinggi termuat kandungan cemburu, sedang rahmah sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang memang kadang sulit dikontrol, karena intensitasnya tinggi dan meluap-luap.
- 3.) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah sedang tinggi pada mereka adalah rasa cintanya *mawaddah*. Dalam perjalanan hidupnya semakin

bertambahnya usia pasangan, maka rahmatnya semakin naik. Sedangkan mawaddahnya semakin turun. Itulah sebabnya ketika melihat kakek nenek kelihatan mesra berduan, itu bukanlah gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka, tetapi rahmah (sayang). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan cemburunya karenanya ia tidak bisa termakan gossip, sedang cinta (mawaddah) yang syarat dengan cemburu karenanya gampang termakan gosip.²⁴

b) Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عن معقل بن يسار قال جلي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني اصبت امرأة ذات حسب وجمال. وانها لا تلد افأتزوجها؟ قال " لا شَمَّ اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم (رواه ابو داود والنسائي)²⁵

²⁴ Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Daarul Hadis 1988), hlm. 227

²⁵ Ibnu hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Usaha Bersama, 1959), hlm. 246

Artinya: *“dari Maqal bin yasar berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya sesungguhnya saya tertarik kepada seorang yang terhormat dan cantik tetapi dia mandul. Apakah saya menikahnya, Nabi menjawab: jangan, kemudian ia mendatangnya kedua kali Rasul tetap melarang. Kemudian datang lagi ketiga kalinya. Rasul bersabda: menikahlah dengan perempuan yang banyak kasih sayangnya lagiin banyak melahirkan anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu dihadapan umat yang lain.” (H, RAbu Dawud dan Nasa’i)*

E. Rukun dan Syarat Sah Menikah

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah Menikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat.²⁶

Syarat yaitu: sesuatu yang yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (menutup aurat pada waktu menjalankan shalat).²⁷

Sah yaitu: sesuatu yang pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁸

Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun menikah itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami isteri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dan dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اُخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ)

²⁶ Abdul hamid hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm 56

²⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68

Artinya: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seiin walinya, maka pernikahannya batal.*

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)

Artinya: *Tidak dianggap nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.*

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - Wali dari perempuan
 - Mahar (maskawin)
 - Calon pengantin laki-laki
 - Calon pengantin perempuan
 - Sighat akad nikah

2. Imam syafi'in berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki.
- Calon pengantin perempuan.
- Wali.
- Dua orang saksi.
- Sighat akad nikah.

3. Ulama Hanafiyah berkata rukun nikah itu hanya ijab Kabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- Sighat (ijab dan qabul)
- Calon [engantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki.
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

2. Syarat sahnya Pernikahan
3. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua:²⁹
 - a) Calon mempelai perempuan halal di nikahkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
 - b) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi
Adapun syarat sah pernikahan bagi calon laki-laki:
 - Calon suami beragama Islam
 - Jelas bahwa calon suami tersebut memang bebar-benar laki-laki
 - Orangnya diketahui dan tertentu
 - Calon laki-laki tersebut jelas halal dikawin dengan calon isteri
 - Calon laki-laki tahu bahwa calon isteri halal baginya
 - Calon suami rela untuk melakukan perkawinan (UU RI No. 1 tahun 1947 Pasal 6 Ayat 1)
 - Tidak sedang melaksanakan ihram

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.63

- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri

Adapun syarat sah nikah bagi perempuan, sebagai berikut:

- Beragama Islam
- Jelas tentang kewanitaanya
- Halal bagi calon suami
- Wanita tidak dalam ikatan perkawainan pada masa iddah
- Tidak dipaksa (UU RI No. 1 Tahun 1974 Ayat 1)
- Tidak dalam ihram haji.

F. Prinsip-Prinsip Menikah

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah.

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:³⁰

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.
- b. Kerelaan dan persetujuan
- c. Pernikahan untuk selamanya.

³⁰ Sudrajat, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 54

G. Hikmah Menikah

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah menikah diantaranya:

- a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali keadaan rumah tangganya teratur.
- c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memaksmurkan dunia masing-masing dengan ciri khas berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda:

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً صَالِحَةً تَعْنِيهِ عَلَى آخِرِهِ

Artinya: *hendaklah dianatara kamu sekalian menjadikan hati yang syukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan isteri*

*mukminah shalihah yang akan menyelamatkannya di akhirat.*³¹

Sayyid sabiq menyebutkan hikmah-hikmah menikah:

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Hal seperti inilah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³²

³¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hukmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Semarang: CV. Asy-Syifah), hlm. 256-2587

³²Al-qur'an Ar-Rum: 21, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 406.

- b) Menikah adalah jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia.
- c) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.³³

H. Difabel Mental

1. Pengertian Mental

Difabel mental adalah sorang yang menyandang kelainan fisik atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan terjadinya hambatan dalam sehari-hari dengan layak. (*WHO-World Health Organization*) mengartikan difabel yaitu suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik itu yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Berdasarkan istilah dan pengertian diatas, maka penulis juga menyimpulkan bahwa difabel

³³ Sayyid Sabiq, *Petunjuk Menuju Pernikahan yang Islami*, (Bandung: IBS, 1995), hlm. 36.

adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan aktivitas dengan cara atau batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia pada umumnya.

Menurut salah seorang kesehatan mental, Kilander, orang yang berperilaku sehat sama dengan orang yang berkepribadian normal. Sementara orang yang berperilaku normal adalah orang yang memperlihatkan kematangan emosional, menerima realitas, bisa bekerja sama dan bisa hidup dengan orang lain. Serta memiliki filsafat hidup yang menjaga dirinya ketika kompilasi-kompliasi kehidupan sehari-hari menjadi gangguan.³⁴

2. Jenis-jenis Penyandang Difabel

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, menjelaskan jenis-jenis ragamnya difabel terdapat dalam BAB II Pasal 4 Poin 1 meliputi beberapa jenis:

- 1) Penyandang disabilitas fisik;
- 2) Penyandang disabilitas intelektual.

³⁴ Sugeng Sejati, *Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 3

- 3) Penyandang disabilitas mental.
- 4) Penyandang disabilitas sensorik

3. Difabel Mental Sebab Penyakit

Meskipun adanya gejala difabel mental yang cenderung baru datangnya, penulis tetap menuliskannya dalam skripsi ini sebagai pengetahuan serta untuk menentukan perbedaan dari berbagai jenis difabel mental. Dalam pembicaraan gangguan mental pada umumnya/ nerurosis/ psikonerosis/ penyakit mental. Semakin berat penderitaan semakin jelas adanya perbedaan itu. Gejala-gejala yang muncul mengenai keadaan fisik, mental, dan emosi:

1. Keadaan Fisik Keadaan fisik dapat disakiskan bagi yang bersangkutan. Contohnya antara lain:
 - a) Suhu tubuh berubah-ubah.
 - b) Denyut nadi menjadi cepat.
 - c) Berkeringat banyak.
 - d) Nafsu makan kurang.
 - e) Gangguan sistem organ dalam tubuh.
2. Keadaan mental Orang non-difabel dapat berfikir secara teratur, dapat menarik

kesimpulan secara sehat, bagi orang yang mengalami gangguan mental misalnya mengalami kekecewaan yang mendalam. Kemampuan berfikir menjadi kacau, karena diselingi rangsangan lainnya. Bila berfikir secara baik, karena memakan waktu lama. Tanda-tandanya sebagai berikut:³⁵

- a) Illusi (salah tangkap dalam mengindra)
- b) Halusinasi (khayalan tanpa ada rangsangan).
- c) Obsesi (diliputi perasaan yang terus menerus hal yang tidak menyenangkan).

4. Jenis difabel mental

Meskipun sudah dipaparkan dalam Bab I, penulis menuliskannya kembali mengenai jenis difabel mental dengan tujuan lebih sistematis dalam penulisan. Gangguan mental atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap bagian dari

³⁵ Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 72

perkembangan normal manusia. Gangguan mental tersebut adalah sebuah kombinasi, perilaku, komponen, atau otak, sistem saraf yang dapat menjalankan fungsi sosial manusia. Berikut ini beberapa contoh jenis difabel mental:

- a. Bipolar Disorder, yaitu sebuah gangguan kecacuan di otak yang terjadi antara lain adalah aktivasi abnormal tidak normalan transmisi GABA (gammaaminobutyric acid) dan glutamat di otak bagian hippocampus.
- b. ADHD (*Attention deficit Hyperactivity Disorder*), merupakan gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak tidak lazim dan cenderung berlebihan.
- c. Autis, autis merupakan suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir atau saat anak masih balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif.

- d. Sindrom Down (*Down Syndrome*), merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada berkas q22 gen SLC5A3, yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan tersebut berdampak pada keterbelakangan fisik dan mental.
- e. Diseleksia, diseleksia merupakan gangguan yang berupa anak yang tidak dapat atau kesulitan membaca, gangguan ini bisa tampak dengan melihat anak yang cenderung kesulitan mengenai huruf atau membedakan huruf. Dalam penggunaan kata atau proses membaca. Gangguan ini terjadi dalam otak ketika memproses informasi yang diterima ke otak.³⁶

³⁶ Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 386

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG CACAT MENTAL

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Keluarga Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.¹ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd Manaf.² Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah.

¹ Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 349

² Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.101

Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M), dan ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.³

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk. Tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan penderitaan mereka. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat pembuangan

³ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27

kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat digunakan.⁴

Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Ibn al-Saib, ayahnya bernama Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah Ibnti Abdullah Ibn alHasan Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'ibersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, kakek Nabi SAW yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, beliau adalah cicit dari Ali Ibn Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.⁵

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam pedesaan yang nyaman.⁶ Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan

⁴ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*: terj. Abdullah Zakiy alKaaf, (Bandung: cv Pustaka Setia), 2000, hlm. 17.

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. 1, h. 326.

⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 142

dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah.⁷ beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah kurma dan tulang unta untuk ditulis di atasnya, kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.⁸

2. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i

Akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, pendidikan Syafi'i tersia-sia. Ia kurang mendapatkan perhatian yang serius dari gurunya. Untungnya anak ini cerdas, pelajaran yang diberikan gurunya dengan mudah di serap dengan baik tidak jarang ia mengajarkan ilmu yang diperolehnya kepada teman-temannya begitu guru mereka meninggalkan kelas, berkat kepandaian dan kebaikan Imam Syafi'iseperti itu, ia dibebaskan dari

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh „ala al-Madzahib alKhamsah", terj. Masykur, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 29.

⁸ Ahmad asy-Syurbasi, .., hlm. 143.

biaya sekolahnya, keadaan ini berlangsung sampai ia hafal al-Qur'an, waktu itu usianya baru sekitar tujuh sampai sembilan tahun.⁹ Begitu tamat belajar, Imam Syafi'i oleh ibunya dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada dalam Masjid Haram, agar dapat membaca Al-qur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya, dalam usia 13 tahun, Syafi'i sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalnya bahkan mampu memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.¹⁰ Ia membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu dan tartil, ia benar-benar khusyu' dicekam perasaan sedih bercampur perasaan takut kepada Allah SWT. Disaat sedang membaca al-Qur'an di Masjid Haram, banyak orang yang mendengarnya duduk bersimpuh di depannya, bahkan adapula yang meneteskan air mata karena terpukau mendengar suaranya yang merdu, bila Syafi'i melihat kejadian seperti itu ia

⁹ Abdullah Mustofa al-Maraghi, "Fath al-Mubin di tabaqat alUsuliyin", terj. Husein Muhammad, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 93.

¹⁰ Abdurrahman asy-Syarkawi, „Aimmah al-Fiqh at-Tis“ah”, terj. H.M.H. al-Hamid al-aHusaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 383.

berhenti membaca. Setelah dapat menghafal isi al-Qur'an dengan lancar, Syafi'i berangkat ke Dusun Badui, untuk mempelajari Bahasa Arab yang asli dan fasih, di sana selama bertahun-tahun Syafi'i mendalami bahasa dan adat istiadat Arab yang asli, bahkan ketekunan dan kesanggupannya, Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab.¹¹

Di samping itu untuk mendalami bahasa Arab ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzailitu, indah susunan bahasanya. Di sana pula beliau belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'imenghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm . 326

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, mengajukan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi namun beliau terus mencari ilmu. Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal dimana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah beliau lebih dahulu menghafal al-Muwatha', susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu beliau memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari al-Muwatha'. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu

Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'itelah mencapai usia dewasa dan matang.¹²

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Ada diantara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil yang perlu diambil dan meninggalkan yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹³

Berikut adalah guru-guru Imam Syafi'i yang merupakan Ulama-ulama besar dari berbagai negara:

- Ulama-ulama Makah yang menjadi gurunya adalah:
 - a. Muslim Ibn Khalid az-Zinji

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 480-481.

¹³ Teunku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-poko Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 486.

- b. Sufyan Ibn Uyainah
 - c. Said Ibn al-Kudah
 - d. Daud Ibn Abdurrahman
 - e. Al-attar
 - f. Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Daud¹⁴
- Ulama-ulam Madinah yang menjadi gurunya adalah:
 - a. Malik Ibn Anas
 - b. Ibrahim Ibn Saad al-Ansari
 - c. Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Darawardi
 - d. Ibrahim Ibn Yahya al-Asami
 - e. Muhammad Said Ibn Abi Fudaik
 - f. Abdullah Ibn Nafi al-Shani
- Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

¹⁴ Ahmad asy-Syurbasi, “Al-Aimatul Artba‘ah”, terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 142.

- a. Waki Ibn Jarah
 - b. Abu Usamah
 - c. Hammad Ibn Usamah
 - d. Ismail Ibn Ulaiah
 - e. Abdul Wahab Ibn Hasan.
- Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:
 - a. Muththarif Ibn Mizan
 - b. Hisyam Ibn Yusuf
 - c. Hakim Shan'a
 - d. Umar Ibn Abi Maslamah al-Auza'i e.
 - Yahya Hasan.¹⁵

3. Murid-muridnya Imam Syafi'i

Diantara murid-muridnya adalah:

- a. Abu Bakar al-Humaidi
- b. Ibrahim Ibn Muhammad al-Abbas

¹⁵ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: alMa'arif, 1976), hlm. 68.

c. Abu Bakar Muhammad Ibn Idris

d. Musa Ibn Abi al-Jarud.¹⁶

4. Karya-karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. Pertama, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Makah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi Qaul al-Qadim yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir. Kedua, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir. Kitab-kitab karya Imam

¹⁶ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 180-181.

Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

17

- a. Ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti : al-Umm dan al-Risalah (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi Ibn Sulaiman)
- b. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtasyar oleh al-Muzanni dan Mukhtasyar oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: al-Imla dan al-Amaly)

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antar lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang Ushul Fiqih (riwayat rabi), kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman Ibn Mahdy di Makah.

¹⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 94-95.

b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqih yang di dalamnya dihubungkan pada sejumlah kitabnya:

- 1) Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila
- 2) Kitab Khila Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
- 3) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i
- 4) Kitab Jama'i al-Ilmi
- 5) Kitab al-Rada Ala Muhammad Ibn al-Hasan
- 6) Kitab Siyar al-Auza'iy
- 7) Kitab Ikhtilaf al-Hadits
- 8) Kitab Ibthalu al-Istihsan

Ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali. Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204

H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.¹⁸

B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

1. Dalil Muttafaq (yang disepakati)

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i memakai empat dasar yaitu: al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, al-Risalah sebagai berikut:¹⁹

ليس لأحد يقوم أبد في شئ : حل أو حرم إلا من جهة العلم ،
وجهة الخير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس

Artinya: *Tidaklah seorang dalam mengatakan hukum selamanya ini halal, ini haram kecuali adanya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas.*

¹⁸ Abdullah Musofa al-Maraghi, ..., hlm. 97.

¹⁹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah), hlm. 39.,

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Syafi'i dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafadz Arab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Untuk direnungkan dan diingat, yang diriwayatkan secara mutawatir. Mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas bahasa Arab adalah bagian dari keaslian, terjemahnya tidak dikatakan al-Qur'an sehingga apabila seseorang membaca terjemahnya dalam sholatnya tidaklah sah.²⁰

Para ulama sepakat menetapkan bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama segala sumber hukum Islam. Mereka berselisih pendapat, hanya tentang kedudukan al-Sunnah, apakah dia dapat mendatangkan hukum-hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an ataukah tidak, Imam Syafi'i

²⁰ yekh Muhammad al-Khudhori Biek, *Ushul Fiqh*, terj. Zaid H. alHamid, (Pekalongan Raja Murah, 1992), hlm. 50.

menegaskan bahwa al-sunnah berhak mendatangkan hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an.

Imam Syafi'i mengkaji al-Qur'an secara mendalam dan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bentuk 'amm dan khas, beliau juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum di dalam al-Qur'an yang mengandung sebagai pernyataan 'amm dan khas.²¹ Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dari al-Qur'an, selain hukumnya dapat disesuaikan dengan al-Qur'an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.²²

²¹ Muhammad bin Idris Syafi'i, ..., hlm. 25.

²² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 73.

b. Sunnah

Sandaran kedua dari madzhab Syafi'i adalah sunnah. Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari sunnah selama sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Imam Syafi'i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama hadits itu muttasil (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits mutawatir saja.²³

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut

²³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 116.

beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Disamping itu, al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Mengenai kedudukan as-sunnah Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1) Menerangkan kemujmalan al-Qur'an, seperti menerangkan kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa.
- 2) Menerangkan khash al-Qur'an yang dikehendaki 'amm dan 'amm yang dikehendaki khas.
- 3) Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

c. Ijma'

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah, berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah.

d. Qiyas

Dari segi bahasa, qiyas ialah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya.²⁴ Sedangkan menurut istilah ahli ushul ialah: Menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada orang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.²⁵

Sesuai dengan ta'rif tersebut di atas, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya

²⁴ Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1989), hlm. 128.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 200.

telah ditetapkan oleh suatu nash dan illat hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui illat-illat hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya adalah sama dengan illat hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nash tersebut, maka peristiwa yang tidak ada nashnya ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada nashnya, lantaran adanya persamaan illat hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada sekiranya tidak ada illat-illatnya.²⁶

Pendirian Imam Syafi'i tentang hukum qiyas sangat hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya qiyas dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa, berikut beberapa perkataan beliau tentang hukum qiyas.²⁷

- a. Imam Ahmad Ibn Hambal pernah berkata:
“Saya pernah berkata kepada Imam Syafi'i

²⁶ Muctar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Maarif, 1997), hlm. 66.

²⁷ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209.

tentang hal qiyas, maka beliau berkata: “Di kala keadaan darurat.” Artinya, bahwa beliau mengadakan hukum secara qiyas jika memang keadaan memaksa.

- b. Imam Syafi’i pernah berkata: “Saya tidak akan meninggalkan hadits Rasul karena akan memasukkan hukum qiyas, dan tidak ada tempat bagi qiyas beserta sunnah Rasulullah.”
- c. Selanjutnya beliau berkata: “Tiap-tiap sesuatu yang menyalahi perintah Rasulullah tentulah jatuh dengan sendirinya dan tidak akan dapat berdiri tegak, juga qiyas tidak akan dapat tegak selama ada sunnah.”

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa cara Imam Syafi’i mengambil atau mendatangkan hukum qiyas itu adalah sebagai berikut:

- a. Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau muamalat saja.

- b. Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari nash al-Qur'an atau dari hadits yang shahih.
- c. Cara beliau mengqiyas adalah dengan nash-nash yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur'an dan dari hadits Nabi.

Oleh sebab itu Imam Syafi'i tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil) dengan cara qiyas, sebagai dalil penggunaan qiyas, beliau mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁸

2. Dalil yang mukhtalaffih (tidak disepakati)

Sedangkan untuk dalil-dalil yang mukhtalaffih yang dipegang oleh Imam Syafi'i dalam istinbath hukum antara lain adalah:

a. Pendapat para sahabat

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW, dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat maupun yang tidak

²⁸ Al-qur'an An-Nisa: 59 , departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 87.

diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka.

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian, pertama sesuatu yang sudah disepakati seperti ijma mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti itu adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat ditarik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak maka imam Syafi'i tetap mengambilmnya. Ketiga, masalah berselisih pendapat maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.²⁹

²⁹ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir al-Ilmiyyah, 1312 H), hlm. 562.

Bilamana hukum suatu masalah tidak diketemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad, dalam kitabnya al-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

b. Masalah Mursalah

Menurut Syafi'i masalah mursalah adalah cara menemukan hukum semua hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh masalah mursalah ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan

tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.

c. Qaul qadim dan Qaul jadid

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul al-qadim dan qaul al-jadid. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Umm, yang dicetuskan di Mesir.³⁰ Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. ketika di Irak, Imam Syafi'i menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadits.

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 6 7.

Pendapat Qadim didiktekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (di antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad Ibn Hanbal, al-Husaen al-Karabsisiy dan al-Za'faraniy), kemungkinan besar yang dimaksud dengan qaul qadim Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara mazhab Iraqy dan pendapat ahlu al-Hadits. Imam Syafi'i pergi ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Makkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai negara Islam. Di Makkah, Imam Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai negara Islam dan mereka pun dapat belajar dari Imam Syafi'i, qaul qadim ini didiktekan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya (ulama Irak) yang datang kepadanya ketika tinggal di Irak. Qaul qadim Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh ahl al-Hadits yang bersifat "tradisional". Tetapi fiqh yang demikian, akan lebih sesuai dengan ulama-

ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Itu pula yang menyebabkan pendapat Imam Syafi'iyang tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan Imam Syafi'ikedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal di sana, kemudian ia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus qaul jadidnya yang didiktekannya kepada murid-muridnya (di antara muridmurid Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir adalah al-Rabi' al-Murady, al-Buwaithiy dan al-Muzaniy), qaul jadid Imam Syafi'i ini dicetuskannya setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadits dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah di fatwakannya di Irak. Jika kandungan qaul jadid Imam Syafi'i ini adalah

hasil ijtihadnya setelah pindah ke Mesir. Qaul jadidnya ini ditulis dalam kitab al-Umm.

C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Status Hukum Pernikahan Penyandang cacat mental

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalam mengartikan difabel mental, namun penulis hanya menemukan kata safih dan uthi, kata ini paling mendekati pengertiannya dalam penelitian skripsi ini. Seperti dalam Kamus Al-munawir kata safih berasal dari kata **سفه** **يسفه** **سفهاً** menganggap bodoh/ memperbodoh sedangkan arti dari orang bodoh tersebut diambil dari **سافه** (orang bodoh/tolol).³¹ Serta terdapat pula dalam literatur fikih kata uthi' yang artinya idiot yang terbelakang. Retridasi mental juga disebut oligofrenia (oligo= kurang atau sedikit dan fren= jiwa atau tuna mental).³²

Melihat pengertian diatas, kata safih (bodoh) dan uthi' (idiot) masih butuh rincian dan kriteria-kriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol,

³¹ Kamus Almunawwir, hlm. 639

³² Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 386.

dan idiot adalah berdasarkan tingkatan IQ, ini terdapat dalam pembahasan retradasi mental. Retradasasi mental adalah bagian dari tuna grahita/difabel mental. Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam dimensi), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi.

Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, difabel mental bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perkawinan jalan yang paling utama sesuai jalan yang di ridha agama Islam. Agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran menikah QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³³

Imam Syafi'i mendefinisikan safih yang dikutip oleh Syeikh Abu Yahya dalam bab Al-Hijr bahwa safih adalah orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akalunya.³⁴

Imam Syafi'i juga mengemukakan pendapatnya dalam kitab al-Umm sebagai berikut:

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل وهما قول الله تبارك وتعالى {فليكتب وليملل الذي عليه

³³ Al-qur'an An-Nur: 32, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 354.

³⁴ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 234.

الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل}.

[قال الشافعي]: وإنما خاطب الله عز وجل بفرائضه البالغين من الرجال والنساء وجعل الإقرار له فكان موجوداً في كتاب الله عز وجل أن أمر الله تعالى الذي عليه الحق أن يمل هو، وأن إملاءه إقراره وهذا يدل على جواز الإقرار على من أقر به، ولا يأمر والله أعلم أحداً أن يمل ليقر إلا البالغ وذلك أن إقرار غير البالغ وصمته وإنكاره سواء عند أهل العلم فيما حفظت عنهم، ولا أعلمهم اختلفوا فيه. ثم قال في المرء الذي عليه الحق أن يمل {فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل}، وأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو، وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غناء به عنه من ماله مقامه

[قال الشافعي]: قد قيل والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه والله أعلم. والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} فأمر عز وجل أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغاً ورشداً قال وإذا أمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أنهم إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر لم يدفع إليهم أموالهم وإذا لم يدفع إليهم فذلك الحجر عليهم كما كانوا لو أونس منهم رشد قبل البلوغ لم يدفع إليهم أموالهم فكذلك لو بلغوا، ولم يؤنس منهم رشد لم تدفع إليهم أموالهم ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ وهكذا قلنا نحن وهم في كل أمر يكمل بأمرين أو أمور فإذا نقص واحد لم يقبل

فزعمنا أن شرط الله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} عدلان حران
مسلمان فلو كان الرجلان حرين مسلمين غير عدلين أو عدلين غير حرين
أو عدلين حرين غير مسلمين لم تجز شهادتهما حتى يستكملان الثلاث³⁵.

Artinya: *Terhalangnya orang yang baligh itu dijelaskan didalam 2 ayat al-Qur'an dimana Allah berfirman “dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan dan hendaklah ia bertakwa keada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan adil”.*

Dimana yang dimaksud Allah tentang kewajiban orang-orang baligh baik laki-laki maupun perempuan untuk mengucapkan atau berikrar itu tercantum di dalam al-Qur'an. Bahwasannya Allah memerintahkan kepada orang yang mempunyai kewajiban (akad) untuk mengikrarkannya. Dan bahwasannya

³⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*(juz 4), Darul Wafa', hlm. 458

yang mengikrarkan itu boleh dari orang yang terdekatnya. Allah tidak menetapkan siapa orangnya kecuali dia baligh. Bahwasannya ikrarnya orang yang belum baligh itu sama saja dengan diamnya menurut ulama dan tidak ada perbedaan tentang hal ini. Maka orang yang melaksanakan akad harus mengikrarkan...nash...terhadap orang yang safih dhoif dan tak kuasa pengucapannya. Maka diperintahkan kepada walinya untuk mengikrarkan mengucapkan mengakadkannya. Karena sohibul hak tidak mampu akan hal itu.

Dan telah dikatakan bahwasannya yang tidak bisa mengucapkan itu adalah orang yang terkekang akalnya dan istilah itu adalah yang paling dekat dengan maknanya. Dan diayat yang lain Allah berfirman...nash...Allah memerintahkan untuk menyerahkan kepada mereka harta mereka apabila mereka sudah baligh dan cerdas. Wajib menyerahkan kepada mereka harta mereka apabila sudah terpenuhi dua syarat tadi. Ini menunjukkan bahwa pada

mereka hanya ada satu hal dari dua tadi maka jangan serahkan kepada mereka terlebih dahulu. Ini menjadi penghalang bagi mereka ketika sama halnya mereka sudah cerdas tapi belum baligh. Maka jangan serahkan harta kepada mereka. Begitu juga ketika mereka sudah baligh tapi belum cerdas. Inilah keharusan bagi kita dan mereka untuk melengkapi dua hal tadi apabila ada yang kurang satu maka tidak diterima. Maka kita harus mengatakan bahwasannya pada tiap-tiap perkara itu disempurnakan dengan dua perkara atau lebih dan ketika kurang maka tidak diterima. Sebagaimana diisyaratkan pada ayat “diantara para saksi yang diridhoi oleh Allah adalah dua saksi yang adil merdeka dan muslim laki-laki, bilamana salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi maka tidak diterima persaksiannya.

Sungguh yang dapat diambil pengertian di dalam bab al-hijr jelas, wallahua’lam. Taqlid kepada orang yang cacat mental dilihat dari

sejauh mana kekuatan intelegensinya dalam membedakan hak dan batil. Adapun esensinya ia menjadi penghalang terhadap hukum taklif adalah dirinya sendiri.

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Dalam hal ini gangguan intelektual atau dapat diartikan cacat mental. Namun hal tersebut merupakan sebuah anugrah sang pencipta alam, Allah menilai makhluknya semuanya sama rata. Tak ada perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan manusia dalam pandangan Allah.

Allah menciptakan manusia dalam sebuah lingkaran besar yang memiliki bagian-bagian kecil yang menyusunya yang berwarna-warni. Menyuruh untuk saling mengenal dan saling memahami. Dalam hal ini manusia diciptakan dalam bentuk rupa yang berbeda-beda, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁶

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di “mata” Allah tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak dipandang secara fisik, namun apa yang telah

³⁶ Al-qur'an Surah Al-Hujurat: 13, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 517

mereka lakukan dalam menggapai ridha Allah SWT. Ketakwaan menurut para ulama adalah seberapa besar ia menyerahkan dirinya untuk mengikuti perintah dan larangan-larangan Allah karena takut kepada dzat-Nya, mencintai segenap apa yang ada pada diri-Nya. Dimana negara sebagai wakil Tuhan harus bisa bebrbuat bijak dan adil. Ini yang harus terus diupayakan.³⁷

Parameter keadilan Tuhan adalah: *al-Mauzun, at-Tasawa wa 'adam at-Tarjih*, dan *Ri'ayat al-Huquq*. Yang pertama dapat diartikan sebagai keseimbangan antar komponen makhluk, kemudian yang kedua adalah persamaan kedudukan tanpa melihat keunggulan fisik yang dimiliki, kemudian yang ketiga adalah saling menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan memberikannya sesuai proporsi yang dia miliki.³⁸

Dalam kenyataannya bagi penyandang difabel masih terjadi diskriminasi, perbedaan, dan terlantarkan. Bagi penyandang difabel mental dalam perkawinan

³⁷ Umar Sulaiman 'Abd Allah al-Asyqar, *at-Taqwa: Ta'rifuha wa Fadhlaha wa Makhdzuratuha wa Qasas min Ahwaliha*, (Pakistan: Dar an-Nafa'is, Cet I: 2012), hlm. 9.

³⁸ Syekh Syamsudin Muhammad, *Iqna'*, (Beurt: Dar Al- kotob, 2003), hlm. 241.

yang hubungannya dengan keluarga menjadi beberapa problem tersendiri dalam menentukan sebuah hukum. Seperti alasan halnya difabel (cacat) menjadi alasan perceraian dan poligami, dengan anggapan penyandang difabel tidak bisa memenuhi kewajibannya ketika status perkawinan. Alasan ini tidak lepas dari adanya perlindungan hukum. Mengenai hukum perkawinan yang berkaitan dengan penyandang difabel seperti yang sudah tercatat di Bab II. Padahal kalau kita melihat dari arti difabel itu sendiri ialah *differently abled* yaitu memiliki kemampuan yang berbeda.

Sebelum melihat kewajiban bagi penyandang difabel dikenai hukum taklifi atau tidak, penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang difabel mental tersebut sah dan tidak atau batalnya. Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan Bab II, bahwa syarat dan rukun perkawinan baik dalam perkawinan maupun dalam undang-undang tidak menyebutkan baik syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya.

Syekh Syamsudin Muhammad dalam Kitab Iqna' ada lima rukun perkawinan *pertama*, (shigot) Ijab Qobul kedua, Calon istri menenai syarat menjadi calon

istri adalah calon yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang masa idah. Baik haram sepersusuan, atau persaudaraan.³⁹

Bagi penyandang difabel mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental.

Selanjutnya mengenai kewajiban bagi penyandang difabel mental dimana mereka harus dibebani hukum atau tidak atas kewajiban sebagai suami atau istri. Contohnya dalam persoalan ini seorang difabel mental tidak bisa memberi nafkah terhadap keluarganya, maka akan berakibat terhadap hak sebagai seorang suami, bahkan menjadi salah satu perceraian.

Untuk persoalan menghukumi orang penyandang difabel mental harus melihat keadaan atau kondisi si penyandang itu sendiri. Seberapa jauh

³⁹ As-Syahid Murtadha Mutahari, *al-‘Adl al-Ilahi*, hlm. 68-71.

tingkatan gangguan mental atau penyakit mental yang diderita orang tersebut. Serta sebab-sebanya harus dicermati pula, sehingga ia masih dalam tataran dibebani kewajiban sebagai suami atau istrinya. Untuk menghukumi status penyandang difabel mental maka dalam hukum Islam terdapat rumusan-rumusan tersendiri.⁴⁰

Pertama, perbuatan orang yang tidak mukalaf tidak dikenai hukum, misalnya perbuatan anak kecil, orang gila, orang tidak mengerti sama sekali peraturan syariat. Seorang dikenai beban hukum atas perbuatannya tergantung perbuatannya itu telah memenuhi syarat sebagai beban hukum.⁴¹ Maka dalam hal ini penyandang difabel harus dibedakan dengan orang gila dan anak kecil, lagi-lagi persoalan dalam seberapa jauh gangguan mental mereka untuk dibebani sebuah hukum. Karena karakter dan sifat hukum itu sendiri. Dijelaskan bahwa hukum bersifat sistematis dan dinamis, harus melihat keadaan. Seperti dicontohkan

⁴⁰ Achmad Mubarak, *al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000), hlm. 107.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 40-41.

tidak akan terjadi potong tangan bila keadaan masyarakat tersebut dalam keadaan paceklik atau kelaparan.⁴²

Dalam membicarakan subyek hukum telah dijelaskan bahwa diantara syarat subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau ahliyatul wujub berlaku bagi seseorang setiap manusia, dimulai sejak ada dalam perut ibunya berkembang sampai dewasa serta berakhir dengan kematian.⁴³

Sedangkan, kecakapan untuk berbuat hukum atau ahliyatul al-ada' tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa biasanya diiringi kemampuan akal maka ini dinyatakan cakap untuk berbuat hukum atau mukalaf.

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 4.

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), hlm. 436.

Dalam hukum Islam ini berkaitan dengan awarid, ini tidak memberikan pengaruh terhadap sifat ahliyatul ada', baik menghilangkannya maupun mengurangnya. Akan tetapi bisa berpengaruh terhadap perubahan sebagian hukum pada diri orang yang terkena awarid ketiga ini. Dengan pertimbangan sebuah pelajaran dan kemaslahatan, seperti contoh safih, lupa, dan banyak utang.

Kedua, mengenai awaridul ahliyah, dalam pembahasan ahliyatul insan (kecakapan manusia). Terbagi menjadi dua, pertama ahliyaul wujub dan ahliyaul ada'. Ahliyatul wujub terbagi dua, pertama ahliyatul wujubnaqishoh dan ahliyatul wujub kamilah. Yang pertama ini dimiliki semenjak janin yang masih dalam kandungan. Kedua, setelah ia dilahirkan. Ini seperti dalam warisan.⁴⁴

Beberapa poin yang harus dicatat dari pembahasan diatas adalah pertama, awaridul samawi yang berkaitan dengan pembahasan adalah gila, lupa dan idiot (*uthi*). Idiot adalah kelainan yang terdapat

⁴⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Indonesia: Haramaian, 2004), hlm. 138

dalam akal yang menghalangi berfikir secara baik sehingga ucapannya tidak menentu sewaktu dia seperti orang gila sewaktu seperti orang waras, begitupun tindakannya. Perbedaan antara gila dan idiot. Gila suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, juga disertai gejolak dan goncangan. Sedangkan *uthi* merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya disertai sifat dungu. Terkadang ia mempunyai kemampuan membedakan baik dan benar seperti orang *tamyiz* maka statusnya pun sama. Terkadang juga tidak punya daya apa-apa maka status hukumnya pun seperti belum *tamyiz*.⁴⁵

Kemudian *safih* (bodoh/tolol) dan *Uthi* (idiot),⁴⁶ kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki akal sehat. *Safih* tidak meniadakan suatu apapun dari hukum syara'. Baik hubungannya

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), hlm. 438

⁴⁶ *Safih* dan *Uthi* adalah mereka menderita sejak anak-anak bahkan sejak lahir, dalam *safih* sama dengan bodoh dan *uthi* sama dengan tolol, *safih* dan *uthi* dalam ilmu kedokteran dibedakan dalam segi IQ terdapat dalam pembahasan retradasi mental.

denga Allah maupun dengan hambanya, karena ia mukalaf secara penuh. Jelas disini kebodohan berkaitan soal harta cakap muamalah. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa orang safih mewajibkan bersama wali dalam bertindak hukum. Apabila menginjak dewasa ia dihalangi bertindak atas hartanya.⁴⁷

Seperti kaidah fikih mengatakan *al-dhororu yuzalu* artinya kemdharatan harus dihilangkan.⁴⁸ Artinya jika sebuah perkawinan tetap dilangsungkan namun dampaknya akan membahayakan terhadap keutuhan keluarga sehingga tidak bisa menjaga agama, jiwa, dan akal, dan harta. Maka perkawinan itu lebih baik untuk diputuskan secara baik.

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid* , (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), hlm. 445.

⁴⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang; RMP UIN Walisongo, Mentri Agama, 2015), hlm, 9

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN
PENYANDANG CACAT MENTAL DALAM
PANDANGAN IMAM SYAFII DAN RELEVANSINYA
DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

**A. Analisis Pendapat Imam Syaf i'i tentang Pernikahan
Penyandang Cacat Mental dan Relevansinya dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pernikahan penyandang cacat mental (*safih*) Imam Syafi'i mendefinisikan safih yang dikutip oleh Syeikh Abu Yahya dalam bab Al-Hijr sebagai berikut:

وفسر الشافعى السفية بالمبذر والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذى
لايستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله

Artinya: *Imam Syafi'i menafsirkan kata safih dengan pemboros, orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan*

orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akal nya.¹

Di dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i juga mengemukakan pendapatnya tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental sebagai berikut:

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل وهما قول الله تبارك وتعالى {فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}.

[قال الشافعي]: وإنما خاطب الله عز وجل بفرائضه البالغين من الرجال والنساء وجعل الإقرار له فكان موجودا في كتاب الله عز وجل أن أمر الله تعالى الذي عليه الحق أن يمل هو، وأن إملاءه إقراره وهذا يدل على جواز الإقرار على من أقر به، ولا يأمر والله أعلم أحدا أن يمل ليقر إلا البالغ وذلك أن إقرار غير البالغ وصمته وإنكاره سواء عند أهل العلم فيما حفظت عنهم، ولا أعلمهم اختلفوا فيه. ثم قال في المرء الذي عليه الحق أن يمل {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}، وأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو، وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غناء به عنه من ماله مقامه

¹ Syekh Abu Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhajju atThullab*,..., hlm. 34.

[قال الشافعي]: قد قيل والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه والله أعلم. والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} فأمر عز وجل أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا قال وإذا أمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أنهم إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر لم يدفع إليهم أموالهم وإذا لم يدفع إليهم فذلك الحجر عليهم كما كانوا لو أونس منهم رشد قبل البلوغ لم يدفع إليهم أموالهم فذلك لو بلغوا، ولم يؤنس منهم رشد لم تدفع إليهم أموالهم ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ وهكذا قلنا نحن وهم في كل أمر يكمل بأمرين أو أمور فإذا نقص واحد لم يقبل فزعمنا أن شرط الله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} عدلان حران مسلمان فلو كان الرجلان حرين مسلمين غير عدلين أو عدلين غير حرين أو عدلين حرين غير مسلمين لم تجز شهادتهما حتى يستكملان الثلاث².

Artinya: Terhalangnya orang yang baligh itu dijelaskan didalam 2 ayat al-Qur'an dimana Allah berfirman “dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan dan hendaklah ia bertakwa keada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak

² Imam Syafi'i, *Al-Umm* (juz 4), Darul Wafa', hlm. 458

mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan adil”.

Dimana yang dimaksud Allah tentang kewajiban orang-orang baligh baik laki-laki maupun perempuan untuk mengucapkan atau berikrar itu tercantum di dalam al-Qur'an. Bahwasannya Allah memerintahkan kepada orang yang mempunyai kewajiban (akad) untuk mengikrarkannya. Dan bahwasannya yang mengikrarkan itu boleh dari orang yang terdekatnya. Allah tidak menetapkan siapa orangnya kecuali dia baligh. Bahwasannya ikrarnya orang yang belum baligh itu sama saja dengan diamnya menurut ulama dan tidak ada perbedaan tentang hal ini. Maka orang yang melaksanakan akad harus mengikrarkan...nash...terhadap orang yang safih dhoif dan tak kuasa pengucapannya. Maka diperintahkan kepada walinya untuk mengikrarkan mengucapkan mengakadkannya. Karena sohibul hak tidak mampu akan hal itu.

Dan telah dikatakan bahwasannya yang tidak bisa mengucapkan itu adalah orang yang terkekang akalunya dan istilah itu adalah yang paling dekat dengan maknanya. Dan di ayat yang lain Allah berfirman...nash...Allah memerintahkan untuk menyerahkan kepada mereka harta mereka apabila mereka sudah baligh dan cerdas. Wajib menyerahkan kepada mereka harta mereka apabila sudah terpenuhi dua syarat tadi. Ini menunjukkan bahwa pada mereka hanya ada satu hal dari dua tadi maka jangan serahkan kepada mereka terlebih dahulu. Ini menjadi penghalang bagi mereka ketika sama halnya mereka sudah cerdas tapi belum baligh. Maka jangan serahkan harta kepada mereka. Begitu juga ketika mereka sudah baligh tapi belum cerdas. Inilah keharusan bagi kita dan mereka untuk melengkapi dua hal tadi apabila ada yang kurang satu maka tidak diterima. Maka kita harus mengatakan bahwasannya pada tiap-tiap perkara itu disempurnakan dengan dua perkara atau lebih dan ketika kurang maka

tidak diterima. Sebagaimana diisyaratkan pada ayat “diantara para saksi yang diridhoi oleh Allah adalah dua saksi yang adil merdeka dan muslim laki-laki, bilamana salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi maka tidak diterima persaksiannya.

Sungguh yang dapat diambil pengertian di dalam bab al-hijr jelas, wallahua’lam. Taqlid kepada orang yang cacat mental dilihat dari sejauh mana kekuatan intelegensinya dalam membedakan hak dan batil. Adapun esensinya ia menjadi penghalang terhadap hukum taklif adalah dirinya sendiri.

Melihat bahwa pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.³ Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup

³ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: al-Bayan, 1999), hlm. 17.

berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴ Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵ Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa an-nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah"

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203.

⁶ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1977), hlm. 76.

itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.⁷

Pernikahan tidaklah sekedar alat penghalalan hubungan seksual semata, namun juga berorientasi pada pembentukan keluarga dan pemenuhan kewajiban yang melekat sebagai konsekuensi akad. Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 disebutkan:

⁷ Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San’ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh alMaram Min Jami Adillati al-Ahkam*, (Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960), hlm. 350.

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁸

Dalam kaidah hukum taklifi disebutkan bahwa mahkum fih berarti "perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara'". Misalnya, dalam ayat 1 Surat al-Maidah Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah*

⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm 100.

*menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁹

Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukallaf yaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibkan dengan ayat tersebut. Adapun Syarat-syarat Mahkum fih, bahwa ada beberapa persyaratan bagi sahnya suatu perbuatan hukum:

- a. Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf sehingga dengan demikian suatu perintah, misalnya, dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah atau Rasul-Nya. Oleh karena itu, seperti dikemukakan Abd al-Wahhab Khallaf, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan secara global, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Rasul-Nya. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang mewajibkan shalat secara global tanpa merinci syarat dan rukunnya, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara

⁹ Al-qur'an Surat Al Maidah: 1, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 106.

rinci dari Rasulullah. Demikian pula ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan haji, puasa, dan zakat.

- b. Diketahui secara pasti oleh orang mukallaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang membuat perintah yang dalam hal ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya maka setiap upaya mencari pemecahan hukum, yang paling pertama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.
- c. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuan dari suatu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebuah perintah yang mustahil menurut akal untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya perintah untuk terbang tanpa memakai alat.

Adapun mahkum 'alaih berarti "orang mukallaf (orang yang layak dibebani hukum taklifi)". Seseorang

baru dianggap layak dibebani hukum taklifi bilamana pada dirinya terdapat beberapa persyaratan:

- a. Mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Bilamana diukur dengan pertumbuhan fisik, batas baligh berakal bagi wanita dengan mulainya menstruasi dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama. Namun jika sampai umur lima belas tahun wanita tidak juga haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas umur minimal baligh berakal.
- b. Mempunyai *ahliyat al-ada'*, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dan ia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini baru

dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia baligh berakal dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa, dan lain-lain lagi yang secara panjang lebar dijelaskan dalam buku-buku Ushul Fiqh. Khusus mengenai harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah di samping sudah baligh berakal juga setelah ada kecerdasan yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Seseorang yang telah mencapai umur baligh berakal, tetapi tidak mampu mengendalikan hartanya, seperti mubazir, tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya, dan oleh karena itu ia perlu dibimbing oleh penanggung jawabnya.

Dalam konsep ahliyah ini dikenal dua istilah yaitu pertama, ahliyah wujub, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia dengan dasar kemanusiaan; dan kedua, ahliyatul ada' (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.

Dengan melihat faktor *ahliat al-ada'* di atas, maka penderita keterbelakangan mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklifi. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut sebagai mahkum 'alaih (orang yang terkena pembebanan hokum. Melihat kenyataan ini maka diperkuat dengan adanya data absolutisme hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حدثنا عثمان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلي
الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النام حتي يستيقض وعن الصبي
حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Affan dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah dari Nabi Saw bersabda: hukum itu tidak bisa dibebankan kepada tiga orang, yaitu: 1). Orang tidur sehingga ia bangun 2). Anak kecil sehingga ia dewasa, dan 3). Orang gila sehingga ia sadar. (HR. Ahmad).*¹⁰

¹⁰ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1805 dalam CD program Mausua'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Lebih lanjutan Mukhtar Yahya menuliskan bahwa terdapat tiga jenis perbuatan yang harus dipandang dalam menentukan sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh mumayyiz, yaitu:

- a. Dalam transaksi yang mengandung manfaat, seperti menerima hibah dan shadaqah, maka tindakannya adalah sah.
- b. Dalam transaksi yang mengandung unsur perpindahan hak milik, seperti memberikan hibah, wasiat, dan wakaf, maka tindakannya tidak sah.
- c. Dalam tindakan yang di dalamnya terdapat unsur manfaat dan perpindahan hak sekaligus, seperti jual beli, dan sewa-menyewa, maka dianggap sah jika terdapat izin dari walinya dan jika tidak diizinkan oleh wali maka tindakannya menjadi batal.¹¹

Dalam hal akad, akad dalam pernikahan disamakan dengan akad dalam jual beli. Syekh Abu Yahya Zakariya al-Anshori menuliskan bahwa disyaratkan dalam shigat nikah apa yang disyaratkan dalam shighat jual beli.

¹¹ Mukhtar Yahya, & Fatchur Rahman,..., hlm. 167.

وشرط فيها أي في صغة ما شرط في صغة النكاح

Artinya: *dan syarat dalam akad nikah artinya yang disyaratkan dalam shigat nikah, apa yang disyaratkan dalam shighat jual beli.*¹²

Dimana dalam hukum jual beli disyaratkan bagi akid (orang yang berakad) untuk mempunyai kemutlakan untuk mentasharufkan harta. Sehingga tidak sah akad orang yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang berada dalam larangan penggunaan harta (al-hijr) dengan adanya kesafihan.¹³

Tentang masalah hukum perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dalam kitab Al-Mizan al-Kubra, disebutkan:

قول الأئمة الثلاثة وعامة الفقهاء: إنه لا يصح النكاح إلا من جازت التصرف.
مع قول أبي حنيفة: إنه يصح النكاح الصبي المميز والسفيه لكنه موقوف
على إجازة الولي

¹² Syeikh Abu Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhajju atThullab*, (Indonesia: Dar al-Ihya, tt.), hlm. 34.

¹³ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 234

Artinya: *Pendapat Imam Tsalatsah (Hanbali, Maliki, Syafi'i) dan Jumhur Fuqaha: sesungguhnya tidak sah pernikahan kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kebolehan pentasharufan harta. Dan pendapat Abu Hanifah bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz dan orang idiot, adalah sah tetapi dengan adanya persetujuan wali.*¹⁴

Dalam perbedaan di atas, Abil Mawahib cenderung memilih pendapat Hanafi. Karena menganggap pendapat yang lain masih lemah. Namun demikian, Imam Syafi'i menjelaskan lebih lanjut tentang masalah tersebut dalam kitabnya Al-Umm bahwa: Imam Syafi'i berkata: dalam masalah orang dewasa yang mengalami kecacatan mental, maka bapaknya diperbolehkan untuk menikahkannya. Karena tidak ada urusan bagi orang tersebut atas dirinya.¹⁵

¹⁴ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 234

¹⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i (terj, Ismail Yakub.),..., hlm. 171

Dan tidak ada seorang pun yang selain walinya yang boleh mengawinkan penderita cacat mental. kemudian disampaikan kepada hakim tentang keadaan mempelai pria dan hakim menanyakan kepada mempelai pria (tentang hajat untuk kawin). Jika dia menginginkan untuk kawin, maka keadaan mempelai pria disampaikan kepada mempelai wanita. Jika mempelai wanita ridho tentang keadaan mempelai pria maka kawinkalah. Jika dilihat mempelai pria tidak berhajar untuk kawin, dengan adanya faktor kelumpuhan dan sebagainya, maka hakim tidak boleh mengawinkannya, begitu juga dengan bapaknya. Kecuali jika pernikahan tersebut bermaksud untuk melayani (mengurus suami), maka pernikahan tersebut diperbolehkan”

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan yang dilakukan penderita cacat mental adalah dilarang. Jika dilihat dalam kadah taklifi, seorang safih (penderita idiot) tidaklah mempunyai kepantasan untuk dipandang perkataan dan perbuatannya. Namun jika terdapat izin dari wali (baik wali nasab atau wali hakim) pernikahan tersebut dapat

dilangsungkan. Tentunya hal ini pun dengan persetujuan dari mempelai wanita dengan keadaan calon suaminya.

Penyandang cacat mental (tunagrahita) merupakan sebuah fenomena nyata penyimpangan mental yang kerap terjadi pada anak-anak. Hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sebagaimana yang Penyandang cacat mental merupakan sebuah fenomena nyata penyimpangan mental yang kerap terjadi pada anak-anak. Hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sebagaimana yang telah dipaparkan, ternyata para penyandang cacat tetap merupakan makhluk seksual, yang mempunyai dorongan seksual, dan yang ingin mengekspresikannya dalam bentuk perilaku seksual.¹⁶

¹⁶ Wimpie Pangkahila, dkk., Kecacatan dan Disfungsi Seksual, <http://www2.kompas.com/kesehatan/news/0601/03/131644.htm>; 6/3/2009: 09.30

B. Analisis Pernikahan Penyandang Cacat Mental dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu sendirilah yang membedakan di antara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Perbedaan ini masih sangat dirasakan oleh mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik-mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat.¹⁷

Secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Hal ini ditekankan untuk pemenuhan hak

¹⁷ Tjepy F Aloewie, Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta, 2000.

penyandang disabilitas karena di sini paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (the right person on the right job) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Untuk menjamin perlindungan khusus terhadap hak dan kedudukan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan instrumen hukum yang secara khusus pula mengatur mengenai penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara

serta jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan secara yuridis formil sebenarnya telah diatur sebelum dibentuknya Undang-Undang tentang HAM, yakni melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Merujuk Undang-undangU No 01 tahun 1974, penyandang disabilitas yang dibahasakan dengan istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik; b) penyandang cacat mental; dan c) penyandang cacat fisik dan mental. Lebih lanjut undang-undang ini menjelaskan:

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;

1. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
2. Cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Dari sini dapat diketahui, bahwa maksud disabilitas adalah kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi penyandanganya untuk melakukan aktivitas sebagaimana umumnya orang.

Meskipun negara secara *Lex Generalis* maupun *Lex Specialis* telah menjamin dan mengakui hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam hukum positifnya, namun dalam praktek dan perkembangannya, pemenuhan hak, kedudukan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Banyak faktor yuridis yang pada kenyataannya justru menghambat pemenuhan hak, kedudukan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut, yang antara lain disebabkan:

Pertama, lemahnya pengaturan serta terbatasnya ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kelemahan dan keterbatasan ruang lingkup ini dimulai dari terminologi “cacat” yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan secara tata bahasa berkonotasi negatif. Selain itu definisi penyandang cacat dalam Pasal 1 angka 1 tergolong sempit dan justru mendiskreditkan para penyandang cacat. Terbatasnya ruang lingkup pemenuhan hak, kedudukan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 juga masih sangat terbatas, yakni hanya pada hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan, serta hak untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.¹⁸ Sedangkan hak-hak lain sama sekali tidak sinkron dengan UU HAM maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Secara

¹⁸ Eva Rahmi Kasim, Muatan Naskah Akademik RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4/1997, disampaikan pada saat diskusi dengan Tim Kerja Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di Sekretariat Jenderal DPR RI, Selasa 4 Februari 2012.

kelembagaan, selayaknya tanggungjawab terhadap para penyandang disabilitas merupakan tanggungjawab yang sifatnya multikompleks dan melibatkan lintas kementerian, namun pengaturan yang ada terkesan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial. Belum lagi, badan atau komisi yang ada sama sekali tidak bersinergi dengan kementerian terkait dan belum dapat mengakomodasi permasalahan dan kepentingan para penyandang disabilitas. Kepentingan para penyandang disabilitas ini menyangkut pemenuhan hak-hak yang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih sangat terbatas dan belum memberikan jaminan kepastian hukum. Pengenaan sanksi baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dinilai oleh sebagian masyarakat sangat ringan dan tidak tegas. Bahkan dalam banyak kasus, misalnya akses dan kesempatan untuk bekerja¹⁹ sama sekali tidak memiliki

¹⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan

penegakan hukum (law enfocerment). Selain karena faktor lemahnya pengaturan, kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ataupun peraturan perundangundangan terkait, menjadikan upaya pemenuhan hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas masih jauh dari harapan.

Kedua, tidak adanya sinkronisasi serta harmonisasi antara UndangUndang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mewajibkan bagi Perusahaan negara dan swasta untuk mempekerjakan penyandang cacat minimal 1% (satu persen) dari 100 orang karyawannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) bagi perusahaan negara dan swasta yang melanggar ketentuan ini.

menyebabkan terjadinya ketiadaan daya dukung, tumpang tindih (dualisme) pengaturan atau bahkan justru saling bertentangan satu sama lain. Ketidaksinkronisasian antara peraturan perundang-undangan ini pada akhirnya memberikan dampak timbulnya permasalahan pemenuhan hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas yang diakibatkan oleh penormaan rumusan peraturan yang tidak efektif, multitafsir, ambigu, komplikasi, bahkan sampai tidak implementatif.

Ketiga, adanya pengesahan terhadap Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities/CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, menjadikan Indonesia sebagai negara pihak yang terikat dengan Konvensi. Pasal 4 CRPD secara garis besar mengikat negara-negara pihak untuk berjanji mengadopsi dan mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Selain itu dengan

diratifikasinya CRPD, Indonesia melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya) harus mengubah cara pandang dan pendekatan dari paradigma pelayanan dan rehabilitasi (*charity atau social based*) menjadi pendekatan yang berbasis hak (*human right based*).

Oleh sebab itu dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental. Sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, dan dapat disamakan dengan pernikahan orang-orang biasa, maka dapat disimpulkan boleh atas izin walinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, makadapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai istinbatnya Imam Syafi'i menggunakan Nas Al- Qur'an surat al-Hujarat ayat 13. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di "mata" Allah tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak dipandang secara fisik, namun apa yang telah mereka lakukan dalam menggapai ridha Allah SWT. Ketakwaan menurut para ulama adalah seberapa besar ia menyerahkan dirinya untuk mengikuti perintah dan larangan-larangan Allah karena takut kepada zat-Nya, mencintai segenap apa yang ada pada diri-Nya.
2. Imam syafi'i memandang bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang

berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Hal ini juga berarti segala sesuatu yang nantinya terjadi dibelakang hari, menjadi tanggung jawab wali. Namun ketika diaplikasikan dalam tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 sangat relevan. Sebab dalam sistem perundangundangan perkawinan di Indonesia khususnya penyandang cacat mental hukunya sebagaimana orang biasa dengan syarat diperbolehkan walinya untuk menikah.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Imam al-Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undangundang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan

harapan semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Semarang; RMP UIN Walisongo, Mentri Agama, 2015.
- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul hamid hakim, Mabadi Awwaliyah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abdullah Mustofa al-Maraghi, “Fath al-Mubin di tabaqat alUsuliyin”, terj. Husein Muhammad, Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Abdurahman, Hak Pendidikan Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Abdurarrahan asy-Syarkawi, „Aimmah al-Fiqh at-Tis’ah”, terj. H.M.H. al-Hamid al-aHusaini, Riwayat Sembilan Imam Fiqih, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006

Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, Al-Mizan Al-Kubra, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, Al-Mizan Al-Kubra, Bairut: Dar al-Fikr, tt..

Achmad Mubarak, al Irsyad An NafsyKonseling Agama Teori dan Kasus, Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000

Ahmad asy-Syurbasi, “Al-Aimatul Artba’ah”, terj. Sabil Huda, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, Mesir: Mu’assah Qurftlbah, 2007.

Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hukmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuh, Semarang: CV. Asy-Syifah.

Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-qur’an Ar-Rum: 21, departemen Agama RI, mushaf Al-qur’an Al-karim Terjemah, Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Al-qur’an Surah Al-Baqarah: 195, departemen Agama RI, mushaf Al-qur’an Al-karim Terjemah, Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Al-qur'an Surah An-Nisa: 1, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014

Al-qur'an Surah An-Nur: 33, departemen Agama RI, mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Al-Quran, Surat An-Nisa', Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: CV Diponegoro, 2014.

Ames D. Abnormal Psychology, Clinical Approach to Psychological Deviants, New Delhi: Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD., 1978.

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid , Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009.

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, akarta: Fajar Interpretama Offset, 2009.

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,

DAFTAR PUSTAKA

Dep Dikbud, Kamus Besar Baahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta:
Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Faidhur Rohmani, Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah
Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat, Skripsi Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2006.

Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997.

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2005.

Hanafie, Ushul Fiqh, (Jakarta: Widjaya, 1989)

Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab,
Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab,
Jakarta: Logos, 1997

Ibnu hajar al-Asqolani, Bulughul Maram, Semarang: Usaha
Bersama, 1959.

Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri,
Bandung: al-Bayan, 1999.

Ibrahim Husain, Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan,
Jakarta: Pustaka firdaus, 2003.

Imam Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Kairo: Daarul
Hadis 1988.

Imam Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Kairo: Daarul
Hadis, 1988.

Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jaih mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Joko Subagiyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.

M. anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

M. bin Ismail al-Kahlaniy, Subul al- Salam, Bandung: Dahlan, tt

Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab: terj. Abdullah Zakiy alKaaf, Bandung: cv Pustaka Setia.

Muctar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Bandung: al-Maarif, 1997

Mufti, Mutala'li, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental, Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Risalah, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah.

Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim.

- Muhammad Jawad Mughniyah, “Al-Fiqh „ala al-Madzahib alKhamsah”, terj. Masykur, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera Basritama, 2000
- Muhammad, Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, terj. Masykur Ab, dkk, Jakarta: Lentera, 2004.
- Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaran, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Mustofa Muhammad asy-Syak‘ah, Islam Tidak Bermadzhah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Nur, Djamaan, Fiqih Munakahat, Semarang CV.Toha Putra:1993.
- Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San’ani , Subul al-Salam Sarh Bulugh alMaram Min Jami Adillati al-Ahkam, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960.
- Sayyid Sabiq, Petunjuk Menuju Pernikahan yang Islami, Bandung: IBS, 1995
- Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Siti Sundari, Kesehatan Mental dalam Kehidupan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung: alMa‘arif, 1976 hlm. 68.
- Sudrajat, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugeng Sejati, Prilaku Abnormal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Syafe'i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syafi'i, Al-Umm :Kitab Induk, Jakarta: CV. Faizan, 1983.
- Syeikh Abu Yahya Zakariya al-Anshori, Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhajju atThullab,....,
- Syeikh Abu Yahya Zakariya al-Anshori, Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhajju atThullab, Indonesia: Dar al-Ihya, tt.
- Syekh Muhammad al-Khudhori Biek, Ushul Fiqh, terj. Zaid H. alHamid, Pekalongan Raja Murah, 1992.
- Syekh Syamsudin Muhammad, Iqna', (Beurt: Dar Al- kotob, 2003
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Teunku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab,

Umar Sulaiman ‘Abd Allah al-Asyqar, at-Taqwa: Ta’rifuha wa Fadhluha wa Makhdzuratuha wa Qasas min Ahwaliha, (Pakistan: Dar an-Nafa’is, Cet I: 2012.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Daar al-Fikr, 1989

Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Munakahat Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Wardani, Pengantar Pendidikan Luar Biasa, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

Willy F Maramis dkk, Ilmu Kedokteran Jiwa, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

Yahya, Muchtar, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.

Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Surabaya: UNESA University Press, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Zuhudi
TTL : Siak, 12 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Lubuk Tilan RT/W 09/02 Dayun Siak

Telepon/Email : 082242390824/ zuhudalba@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- SD N 011 Lubuk Tilan (1999 - 2005)
- MTs Nurul Ulum Kudus (2005 - 2008)
- MA NU TBS Kudus (2008 - 2012)
- UIN Walisongo Semarang (2012 - 2019)

B. Non Formal :

- MDA Lubuk Tilan
- Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus
- Pondok Pesantren Ath-Thullab TBS Kudus
- Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an An-Nasimiyyah

Pengalaman Organisasi

- Anggota UKM JQH FSH UIN Walisongo (2012)
- Koordinator divisi Bahasa Arab UKM JQH FSH (2013-2015)

Demikian CV ini kami buat sesuai dengan keadaan yang
sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Muhammad Zuhudi